

ANALISIS DETERMINAN KEMISKINAN DI PROVINSI

JAWA BARAT

JURNAL



Oleh:

Nama : Acep Kurniawan

Nomor Mahasiswa : 14313262

Program Studi : Ilmu Ekonomi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI

YOGYAKARTA

2018

HALAMAN PENGESAHAN JURNAL

ANALISIS DETERMINAN KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA BARAT

Nama : Acep Kurniawan
NIM : 14313262
Prodi : Ilmu Ekonomi

Yogyakarta, 23 Mei 2018
telah disetujui dan disahkan oleh
Dosen Pembimbing,



Awan Setya Dewanta Drs.,M.Ec.Dev.

ANALISIS DETERMINAN KEMISKINAN DI PROVINSI

JAWA BARAT

Acep Kurniawan

Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, UII

14313262@sudents.uui.ac.id

ABSTRAK

Skripsi ini memiliki judul “*Analisis Determinan Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat*”, sedangkan tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia, pengangguran, dan upah minimum. Jenis penelitiannya bersifat kuantitatif yaitu mengambil data sekunder melalui Badan Pusat Statistik (BPS) wilayah Jawa Barat dengan data *time-series* yaitu tahun 2011-2016, sedangkan data yang diambil adalah indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka, dan Upah Minimum dari berbagai Kota dan Kabupaten. Kemudian untuk metode pengolahan data serta analisisnya menggunakan metode regresi data panel yang dibantu oleh program *EViews 8*. Dalam penelitian ini menggunakan variabel dependen yaitu tingkat kemiskinan dan variabel independen yang terdiri dari IPM, pengangguran, dan upah minimum. Model hasil penelitian dalam skripsi ini menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif terhadap Tingkat Kemiskinan, sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka dan Upah Minimum berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat.

Kata Kunci : Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran, Upah Minimum.

PENDAHULUAN

Istilah kemiskinan muncul ketika masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan tidak dapat mencapai standar hidup tertentu. Menurut Badan Pusat Statistik (2010), kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan. Ada beberapa jenis kemiskinan yaitu kemiskinan struktural dan kultural. Kemiskinan struktural terjadi karena struktur yang membuat sebagian masyarakat tertentu yang mendominasi sarana ekonomi, sosial, politik dan budaya (Lubis, 1986).

Pembangunan ekonomi yang terpusat di Pulau Jawa, tidak lepas dari masalah kemiskinan. Berdasarkan BPS, secara umum dilihat dari tahun 2011 sampai 2016 presentase penduduk miskin di Pulau Jawa mengalami penurunan disetiap tahunnya. Rata-rata penduduk miskin tertinggi terdapat di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 14,63 persen, dan penduduk miskin terendah terdapat di Provinsi DKI Jakarta sebesar 3,77 persen. Rata-rata penduduk miskin di Jawa Barat 9,61 persen, yang merupakan terbesar ke empat setelah Provinsi DI Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan indeks yang komposisi didasarkan pada tiga indikator yaitu kesehatan, pendidikan dan standar hidup manusia (Hakim, 2002). Berdasarkan BPS, tahun 2011 sampai 2016 indeks pembangunan manusia menunjukkan pengaruh positif. Hal ini dapat dilihat dari indeks pembangunan manusia (IPM) yang terus mengalami kenaikan disetiap tahunnya. Pada tahun 2011 indeks pembangunan manusia sebesar 66,67 persen mengalami kenaikan ditahun 2012 menjadi 67,32 persen dan ditahun 2013 naik menjadi 68,25 persen, ditahun 2014 mengalami kenaikan lagi sebesar 68,80 persen serta tahun 2015 mengalami kenaikan lagi menjadi 69,50 persen dan ditahun 2016 sama seperti ditahun 2015 sebesar 69,50 persen.

Tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Barat mengalami naik turun disetiap tahunnya. 3 tingkat pengangguran ditahun 2011 sebesar 9,83 persen dan mengalami penurunan ditahun 2012 menjadi 9,08 persen, dan ditahun 2013

mengalami kenaikan yang tidak terlalu besar menjadi 9,16 persen dan ditahun 2014 mengalami penurunan menjadi 8,45 persen dan 2015 mengalami kenaikan yang tidak terlalu tinggi sebesar 8,72 persen dan di 2016 mengalami kenaikan yang tidak terlalu besar menjadi 8,89 persen.

Faktor lain yang mempengaruhi tingkat kemiskinan adalah upah minimum. Berdasarkan data dari BPS upah minimum Provinsi Jawa Barat pada tahun 2011 sebesar 732.000 rupiah dan mengalami peningkatan ditahun 2012 sebesar 780.000, dan ditahun 2013 mengalami peningkatan lagi sebesar 850.000 rupiah dan meningkat lagi ditahun 2014 sebesar 1000.000 rupiah dan ditahun 2015 tidak mengalami peningkatan masih sama dengan tahun 2014 sebesar 1000.000 dan ditahun 2016 mengalami peningkatan lagi sebesar 1.300.000 rupiah. Meskipun rata-rata disetiap tahunnya upah minimum meningkat namun kenyataannya hal ini tidak mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat.

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan membahas beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan. Tujuan dari peneliti-peneliti terdahulu adalah sebagai refrensi dalam penelitian dan memperkuat hasil analisis, adapun beberapa penelitian-penelitian tersebut yaitu:

Pratama (2014), melakukan penelitian mengenai “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Indonesia Pada Tahun 2012” melihat perbedaan dari tingkat kemiskinan antar provinsi dengan menjadikan salah satu provins sebagai basis perbandingan. Variabel dalam penelitian ini adalah penapatan perkapita, tingkat pendidikan, tingkat inflasi, konsumsi, dan indeks pembangunan manusia. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Menurut hasil penelitian memperlihatkan adanya pengaruh simultan terhadap variabel pendapatan perkapita, tingkat pendidikan, tingkat inflasi, konsumsi, dan indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan dengan

koefisien determinasi 0,56 (*R-Square*). variabel tingkat inflasi, konsumsi, pendapatan perkapita, dan indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, sedangkan tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kemiskinan.

Zuhdiyati (2017) membahas beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia dalam kurun waktu lima tahun dari tahun 2011-2015. Adapun beberapa variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Alat analisis menggunakan regresi dan data panel. Berdasarkan hasil yang diteliti ditemukan bahwa secara bersamaan variabel pertumbuhan ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan dengan koefisien determinan 0.968 (*R-Square*). Variabel tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.

Dores (2014) menggunakan data sekunder 19 kabupaten atau kota di Provinsi Sumatera Barat yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat. Data diolah menggunakan SPSS dengan menggunakan alat analisis Regresi Linear Berganda untuk melihat pengaruh angka melek huruf dan angka harapan hidup terhadap jumlah penduduk miskin.

Puspita (2015), melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana “Determinan Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Periode 2008-2012” variabel terikatnya adalah tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran, PDRB, jumlah penduduk dan angka melek huruf sebagai variabel bebas. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan pendekatan model *random effect*. Menurut hasil analisis dan pengujian estimasi bahwa variabel pengangguran, PDRB, dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan variabel angka melek huruf tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Variabel jumlah penduduk dan pengangguran

berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan variabel PDRB berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan.

Yacoup (2012) meneliti mengenai pengaruh tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan. Dilakukan di Kabupaten atau Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Tingkat pengangguran berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat yang menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan.

Sukmaraga (2011) meneliti tentang seberapa besar pengaruh Indeks pembangunan manusia, PDRB per kapita dan jumlah pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah tahun 2008. Variabel IPM dan PDRB menunjukkan hasil yang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Variabel jumlah pengangguran menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah.

Suliswanto (2010) meneliti pengaruh indeks pembangunan manusia dan PDRB terhadap jumlah kemiskinan di Indonesia. Variabel PDRB memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan. Sedangkan variabel indeks pembangunan manusia lebih dominan dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Yang artinya variabel PDRB tidak begitu berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin.

LANDASAN TEORI

Landasan teori pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Definisi Kemiskinan

Kondisi ketidakmampuan seseorang secara ekonomi dalam memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah yang disebabkan oleh rendahnya pendapatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti pangan, papan, dan sandang serta rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM).

2. Definisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui capaian kualitas hidup pembangunan manusia. Beberapa komponen indeks pembangunan manusia yaitu capaian umur panjang dan bidang kesehatan, rata-rata sekolah dan rata-rata lamanya bersekolah, kemampuan daya beli masyarakat yang dilihat dari pengeluaran perkapita, serta capaian bidang pendidikan berupa angka melek huruf.

3. Definisi Pengangguran

Pengangguran merupakan individu yang dikelompokkan dalam angkatan kerja aktif yang sedang mencari kerja, tetapi tidak memperoleh pekerjaan (Sukirno, 2006). Pengangguran merupakan individu yang berada pada umur angkatan kerja dan sedang mencari kerja dengan tingkat upah yang berlaku (Irawan dan Suparmoko, 2002).

4. Definisi Upah Minimum

Berdasarkan peraturan yang dibuat Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per-01/Men/1999 tentang upah minimum merupakan upah bulanan yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan yang tetap. Tunjangan tetap adalah imbalan setiap bulan yang tidak terkait dengan kehadiran atau pencapaian prestasi.

5. Hubungan Antara Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan

Suatu daerah dengan kualitas pembangunan manusia yang baik memiliki presentase penduduk miskin yang rendah. Akan tetapi, jika suatu daerah mempunyai indeks pembangunan manusia yang rendah seperti kesehatan, pendidikan, dan keterampilan yang rendah maka tingkat kemiskinan akan meningkat pada daerah tersebut. Sehingga indeks pembangunan manusia merupakan variabel penting dalam pengentasan kemiskinan.

6. Hubungan Antara Pengangguran Dengan Tingkat Kemiskinan

Menurut teori lingkaran setan (nurske) yang menyebutkan kemiskinan disebabkan oleh rendahnya produktivitas. Dapat diartikan pengangguran disebabkan oleh rendahnya produktivitas seseorang. Karena pengangguran

tidak memiliki pekerjaan yang tetap sehingga tidak dapat menghasilkan upah atau gaji. Untuk dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari diperlukan upah atau gaji.

7. Hubungan Antara Upah Minimum Dengan Tingkat Kemiskinan

Upah minimum berguna untuk mengangkat derajat masyarakat yang pendapatannya rendah. Semakin meningkat tingkat upah minimum, maka akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga kesejahteraan juga meningkat dan dapat terbebas dari kemiskinan.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data sekunder yang digunakan adalah data panel yang menggunakan gabungan dari deret waktu (*time series*) dari tahun 2011-2016 dan deter lintang (*cross section*) sebanyak 26 kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari 17 kabupaten dan 9 kota dan berhasil menghasilkan 156 observasi. Provinsi Jawa Barat sendiri sebetulnya memiliki 18 kabupaten, akan tetapi untuk kabupaten Pangandaran dihilangkan dalam observasi ini dikarenakan Pangandaran baru berdiri pada tahun 2012, sedangkan penelitian ini mengambil periode waktu 2011 hingga 2012.

Definisi Operasional

1. Kemiskinan adalah rendahnya pendapatan yang diperoleh masyarakat dan jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup di masing-masing Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Barat (dalam satuan ribu jiwa).
2. Indeks pembangunan manusia (IPM) adalah indeks komposit dari gabungan empat indikator yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lamanya sekolah dan pengeluaran per kapita di Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Barat (satuan persen)

3. Pengangguran adalah jumlah penduduk yang tidak mempunyai pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan di Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Barat (satuan jiwa).
4. Upah minimum yang telah ditentukan pemerintah disetiap Kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Barat

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan analisis data kuantitatif. Dalam penelitian ini, untuk mengolah data menggunakan analisis data kuantitatif, untuk mengetahui apakah variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen. Berdasarkan analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan Metode Regresi Data Panel

$$TK = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon_{it}$$

Dimana:

TK = Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Barat tahun 2011-2016 (ribu jiwa)

I = Kabupaten atau Kota Provinsi Jawa Barat

t = Waktu atau Tahun (2011-2016)

IPM (X_1) = Jumlah Indeks Pembangunan Manusia dengan metode baru yang telah diterbitkan oleh badan pusat statistic Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Barat (Satuan %)

TPT (X_2) = Jumlah Pengangguran terbuka penduduk yang berumur 15 tahun keatas menurut Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Barat (satuan ribu jiwa)

UMK (X_3) = Jumlah Upah Minimum Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan oleh Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Barat (satuan rupiah)

β_0 = Konstan

$\beta_1 \beta_2 \beta_3$ = Koefisien regresi berganda

ε_{it} = Variabel Pengganggu
 ε = Error Term

1. Metode Estimasi Data Panel

a. *Common Effect Model*

Metode pendekatan *common effect* menganggap bahwa intersep dan slope tetap berhubungan baik antar individu maupun antar waktu. Dapat diasumsikan adanya perbedaan intersep dan slope akan dijelaskan oleh variabel pengganggu (*error* atau *residual*). (Sriyati, 2014)

b. *Fixed Effect Model*

Model ini mengasumsikan bahwa obyek observasi ataupun koefisien regresi (slope) tetap besar dari waktu ke waktu. Dalam asumsi model *fixed effect* menjelaskan bahwa asumsi slope konstan tetapi intersep bervariasi antar unit dan asumsi slope konstan tetapi intersep bervariasi antar individu atau unit dan antar periode waktu. Estimasi model *fixed effect* dapat dilakukan dengan menggunakan dummy sesuai dengan penjelasan dan kriteria masing-masing asumsi. Dalam model estimasi ini sering disebut dengan *Least Squares Dummy Variabels (LSDV)* dengan persamaan regresi data panel:

$$TK = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon_{it}$$

Dimana:

TK = Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)

i = Kabupaten atau Kota Provinsi Jawa Barat

t = Waktu atau Tahun (2011-2016)

IPM (X_1) = Jumlah Indeks Pembangunan Manusia (Satuan %)

TPT (X_2) = Jumlah Pengangguran terbuka (satuan ribu jiwa)

UMK (X_3) = Jumlah Upah Minimum Provinsi (satuan rupiah)

β_0	= Konstanta
$\beta_1 \beta_2 \beta_3$	= Koefisien regresi berganda
ε_{it}	= Variabel Pengganggu
ε	= Error Term

Pendekatan *fixed effect* memiliki kemungkinan terjadinya ketidaksesuaian model dengan keadaan yang sesungguhnya. Sehingga dalam hal ini diperlukan model yang dapat menunjukkan perbedaan antar intersep yang mengasumsikan adanya perbedaan baik antar objek maupun antar waktu (Sriyana, 2014).

c. *Random Effect Model*

Sriyana (2014) menjelaskan bahwa model ini mengasumsikan perbedaan intersep dan konstanta yang disebabkan oleh *residual* atau *error* sebagai akibat dari perbedaan antar unit dan antar periode waktu yang terjadi secara random. Model estimasi ini disebut dengan *Error Component Model (ECM)*.

2. Penentuan Model Estimasi

Untuk memilih model yang tepat terdapat beberapa pengujian yang dapat dilakukan, yaitu :

1. Chow Test (Uji Chow)

Uji Chow adalah pengujian untuk menentukan model *Common Effect* atau *Fixed Effect* yang paling tepat digunakan dalam estimasi data panel. Hipotesis dalam *uji chow* adalah :

H_0 : Memilih model *Common Effect* atau *pooled OLS* jika nilai probabilitas F statistiknya tidak signifikan pada α 0,05%

H_1 : memilih model *Fixed Effect*, jika nilai probabilitas F statistiknya signifikan pada α 0,05%

Hipotesis yang digunakan memiliki intersep dengan nilai yang sama. Jika nilai probabilitas F statistik lebih dari F tabel maka H_0 berarti model yang

tepat digunakan adalah model *fixed effect*, begitupun sebaliknya (Sriyana, 2014).

2. Uji Hausman

Uji hausman merupakan pengujian statistik dalam memilih apakah model *Fixed Effect* atau *Random Effect* yang paling tepat untuk digunakan. Pengujian uji Hausman dilakukan dengan hipotesis berikut:

H₀: Memilih model *Random Effect*, jika nilai *Chi-square*nya tidak signifikan pada α 0,05%

H₁: Memilih model *Fixed Effect*, jika nilai *Chi-square*nya signifikan pada α 0,05%

Jika nilai statistik *hausman* (nilai W-hitung) < dibandingkan nilai kritis *chi-square*nya atau *p value*> dari α maka yang tepat digunakan adalah model *Random Effect* (Sriyana, 2014).

3. Pengujian Hipotesis

Uji statistik yang digunakan pada penelitian ini adalah Uji Koefisien Determinasi (R²), Uji Koefisien Regresi secara Bersama-sama (Uji F) dan Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji t).

a. R² (Koefisien Determinasi)

Sriyana (2014), menjelaskan bahwa koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa baik hasil analisis yang ditunjukkan oleh nilai R² dalam bentuk presentase. Besarnya R² berasal dari proporsi variabel independen terhadap variabel dependen yang dapat dijelaskan dengan model dan sisanya, tidak dijelaskan dalam model. Semakin tinggi R² tersebut maka hubungan variabel independen dengan variabel dependen semakin kuat.

b. Koefisien Regresi Secara Bersama-sama (Uji F)

Dalam pengujian variabel dependen terhadap variabel independen secara individu di uji serempak dengan memakai Uji F. Untuk menguji koefisien regresi secara bersama-sama perlu membuat hipotesis :

$$H_0: \beta_1 = \beta_2 = 0$$

$$H_1: \beta_1 \neq \beta_2 \neq 0$$

Jika F hitung > F tabel (kritis) maka menolak H_0 namun jika F hitung < F tabel (kritis) maka menerima H_0 (Sriyana, 2014).

c. Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menyusun hipotesis statistik, menentukan derajat kesalahan (α), menentukan t kritis dan keputusan hipotesis. Nilai t variabel diperoleh dengan $\alpha = 0,05\%$ dan df. Jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 diterima atau menolak H_1 , jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 ditolak atau menerima H_1 (Sriyana, 2014).

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan BPS, laju pertumbuhan penduduk migrasi dan kelahiran di 5 kabupaten Provinsi Jawa Barat, laju pertumbuhan tertinggi pertama berada di Bogor sebesar 4,25 persen, laju pertumbuhan tertinggi kedua berada di Bandung sebesar 2,97 persen, laju pertumbuhan tertinggi ketiga berada di Garut sebesar 0,86 persen. Laju pertumbuhan tertinggi keempat adalah Cianjur sebesar -0,26 persen dan yang kelima adalah Cirebon sebesar -0,81 yang merupakan daerah terendah dalam tingkat laju pertumbuhan penduduk (BPS, 2015). Tabel 4.1 akan menjelaskan hubungannya dengan gambar peta 4.1 mengenai analisis kewilayahan pada sub bab 4.2.

1. Deskripsi Data

Dalam analisis ini dapat menggambarkan data hasil penelitian yang berhubungan dengan penggunaan variabel penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah data sekunder yang diperoleh dari kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat. Data tersebut adalah tingkat kemiskinan, indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka serta upah minimum kabupaten atau kota. Berikut adalah hasil deskriptif dari data variabel penelitian :

Tabel 4.2
Statistik Deskriptif

Variabel	Tingkat kemiskinan (ribu jiwa)	Indeks pembangunan manusia(persen)	Tingkat pengangguran terbuka (ribu jiwa)	Upah minimum (rupiah)
Mean	170,58	68,31846154	80546	1521861
Maximum	494,60	78,88	474108	2253400
Minimum	13,38	61,36	5815	987622
Std. Dev	111,1845898	5,152357	88566,92	430127,80
Observations	27	27	27	27

Sumber : Hasil pengolahan data sekunder, 2017

2. Analisis Kewilayahan

Berdasarkan analisis kewilayahan spasial kemiskinan lebih berpusat pada daerah Kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kota Bandung yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat, namun kantong kemiskinan juga terdapat pada Kabupaten-Kabupaten tersebut. Berikut ini adalah gambar peta Provinsi Jawa Barat :



Gambar 4.1 Peta Provinsi Jawa Barat dan Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2016

Keterangan :

- Sangat Miskin
- Miskin Menengah
- Miskin

Berdasarkan gambar 4.1 dan tabel 4.1 Provinsi Jawa Barat yang merupakan golongan dalam jumlah penduduk sangat miskin (250-500 ribu jiwa).

3. Hasil dan Analisis Data

a) Uji Chow

Untuk memilih antara model *Common Effect* atau model *Fixed Effect* dapat menggunakan *Uji Chow*.

H_0 : Jika nilai *Chi-square*nya tidak signifikan pada α 0,05%, maka memilih model *Random Effect*

H₁ : Jika nilai *Chi-square*nya signifikan pada α 0,05%, maka memilih model *Fixed Effect*

Berdasarkan hasil *Uji Husman* diperoleh nilai probabilitas *chi-square*nya sebesar 0,0000 yang lebih kecil dari alpha 0,05 ($0,0000 < 0,05$), maka H₀ ditolak dan menerima H₁. Maka *Fixed Effect* adalah model yang tepat untuk digunakan. Dari hasil pengujian diatas, maka akan ditentukan apakah akan menggunakan model *Fixed Effect* atau *Random Effect*. Untuk melakukan perhitungan model *Random Effect* yang akan dibandingkan dengan model *Fixed Effect* dengan menggunakan *Uji Hausman Test*.

b) Uji Hausman

Untuk memilih model yang terbaik antara *Fixed Effect* atau *Random Effect* maka dapat menggunakan *Uji Hausman*.

H₀ : Jika nilai *Chi-square*nya tidak signifikan pada α 0,05%, maka memilih model *Random Effect*

H₁: Jika nilai *Chi-square*nya signifikan pada α 0,05%, maka memilih model *Fixed Effect*

Berdasarkan hasil *Uji Husman* diperoleh nilai probabilitas *Chi-square*nya sebesar 0,0000 yang lebih kecil dari alpha 0,05 ($0,0000 < 0,05$), maka H₀ ditolak dan menerima H₁. Maka *Fixed Effect* adalah model yang tepat untuk digunakan. Dengan demikian, berdasarkan *Uji Hausman* model yang tepat untuk menganalisis tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat adalah model *Fixed Effect* dibandingkan dengan model *Random Effect*.

4. Model Regresi Panel Fixed Effect**Tabel 4.3****Model Fixed Effect**

Dependent Variable: Y?
 Method: Pooled Least Squares
 Date: 04/01/18 Time: 00:27
 Sample: 2011 2016
 Included observations: 6
 Cross-sections included: 26
 Total pool (balanced) observations: 156

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2275.880	482.6904	4.714988	0.0000
LOG(X1?)	-511.6105	131.6915	-3.884916	0.0002
LOG(X2?)	0.203020	3.961308	0.051251	0.9592
LOG(X3?)	3.600009	6.397641	0.562709	0.5746

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.992106	Mean dependent var	169.3320
Adjusted R-squared	0.990366	S.D. dependent var	109.8728
S.E. of regression	10.78424	Akaike info criterion	7.760174
Sum squared resid	14770.07	Schwarz criterion	8.327134
Log likelihood	-576.2936	Hannan-Quinn criter.	7.990449
F-statistic	570.0770	Durbin-Watson stat	1.801253
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : Hasil Pengolahan *Eviews 8*

Model Regresi *fixed effect* pada tingkat kemiskinan:

$$TK = \beta_0 + \beta_1 X_1 + X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon_{it}$$

$$TK = 2275.880 - 511.6105 IPM + 0.203020 TPT + 3.600009 UMK + \varepsilon_{it}$$

Dimana :

TK = Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)

i = Kabupaten atau Kota Provinsi Jawa Barat

t	= Waktu atau Tahun(2011-2016)
IPM (X_1)	= Jumlah Indeks Pembangunan Manusia (Satuan %)
TPT (X_2)	= Jumlah Pengangguran terbuka (satuan ribu jiwa)
UMK (X_3)	= Jumlah Upah Minimum Provinsi (satuan rupiah)
β_0	= Konstan
$\beta_1 \beta_2 \beta_3$	= Koefisien regresi berganda
ε_{it}	= Variabel Pengganggu
ε	= <i>Error Term</i>

5. Pengujian Hipotesis

a) R^2 (Koefisien Determinasi)

Pada model estimasi *fixed effect*, R^2 sebesar 0.992106 sehingga variasi variabel tingkat kemiskinan dapat dijelaskan dengan indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka, dan upah minimum sebesar 99,21% serta sisanya 0,79% dijelaskan oleh variabel diluar model.

b) Uji F

Hasil perhitungan pada *fixed effect*, diperoleh dari nilai probabilitas F sebesar 0.000000 yang lebih kecil dari α 0,05 ($0.000000 < 0,05$), maka dapat dinyatakan bahwa indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka dan upah minimum provinsi berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

c) Uji t

Uji hipotesis ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka dan upah minimum kabupaten atau kota terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat.

1) Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan

Hasil perhitungan pada model *fixed effect*, variabel indeks pembangunan manusia memiliki nilai koefisien regresi sebesar -511.6105 dan memiliki nilai probabilitas sebesar 0.0000 lebih kecil dari pada α 0,05 ($0.0000 < 0,05$), maka dapat dinyatakan indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Maka hipotesis pertama yang menyatakan indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat dapat diterima atau terbukti.

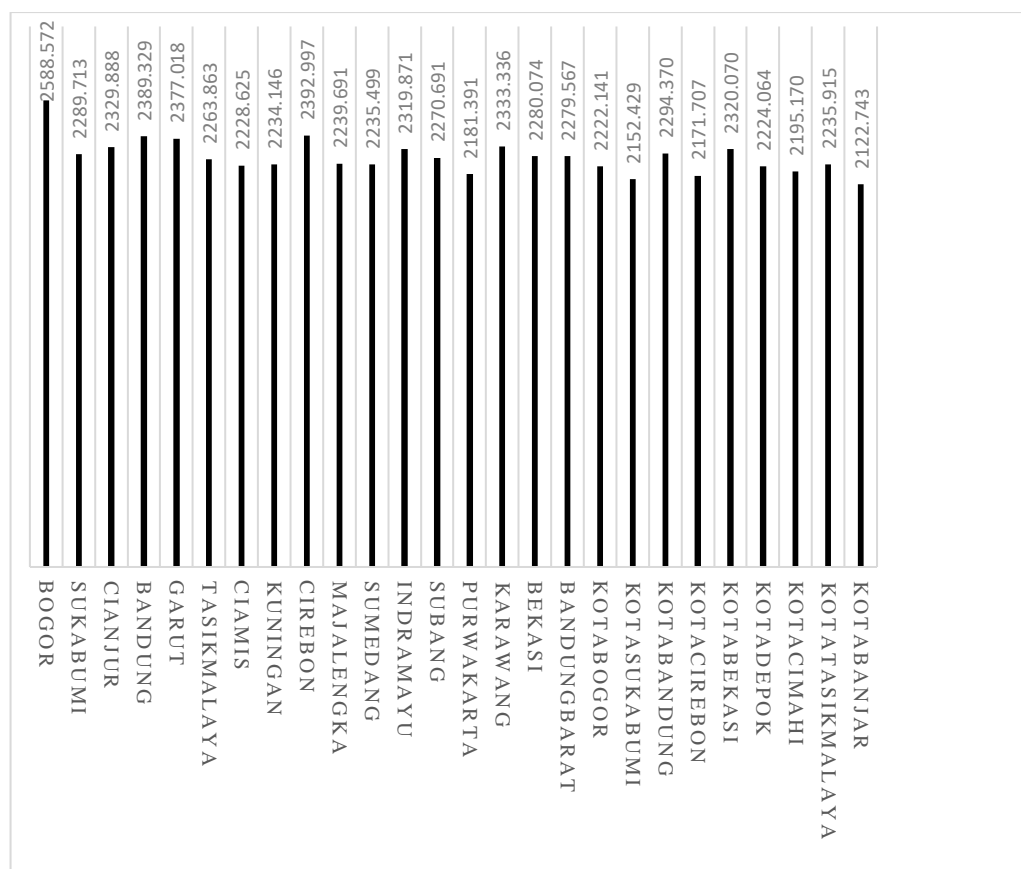
2) Pengaruh Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan

Hasil perhitungan pada model *fixed effect*, variabel tingkat pengangguran memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0.203020 dan memiliki nilai probabilitas sebesar 0.9592 lebih besar dari pada α 0,05 ($0.9592 > 0,05$), maka dapat dinyatakan pengangguran tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Maka hipotesis kedua yang menyatakan pengangguran berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat dapat diterima.

3) Pengaruh Upah Minimum Terhadap Tingkat Kemiskinan

Hasil perhitungan pada *fixed effect*, variabel upah minimum memiliki nilai koefisien regresi sebesar 3.600009 dan memiliki nilai probabilitas sebesar 0.5746 lebih besar dari pada α 0,05 ($0.5746 > 0,05$), maka dapat dinyatakan upah minimum tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Maka hipotesis ketiga yang menyatakan upah minimum berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat tidak dapat diterima.

6. Interpretasi Hasil Persamaan Regresi



Grafik 4.1 Hasil Konstanta Berdasarkan Estimasi *Fixed Effect*

Dalam menginterpretasikan hasil regresi data panel menggunakan model *fixed effect*. Dilihat dari wilayah Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat berbeda disetiap Kabupaten/Kota. Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa tingkat kemiskinan tertinggi terdapat pada Kabupaten Bogor yaitu sebesar 2,588,572 kemudian kemiskinan tertinggi setelah Kabupaten Bogor adalah Kabupaten Cirebon sebesar 2,392,997 dan tingkat kemiskinan terendah berada di Kota Banjar sebesar 2,122,743.

7. Pembahasan

1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Dalam hasil penelitian ini indeks pembangunan manusia berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Barat, hal ini sesuai dengan hasil hipotesis yang sudah dijelaskan sebelumnya. Hasil perhitungan dapat diketahui bahwa variabel indeks pembangunan manusia memiliki nilai koefisien negatif sebesar 511.6105, artinya setiap kenaikan 1% maka akan menyebabkan tingkat kemiskinan menurun sebesar 511.6105 ribu jiwa.

Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh model yang digunakan dalam menguji hipotesis menggunakan model *fixed effect*. Dari hasil pengujian *fixed effect* dapat disimpulkan bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai indeks pembangunan manusia akan menyebabkan tingkat kemiskinan menurun. Peningkatan indeks pembangunan manusia seperti meningkatkan keahlian serta pendidikan yang tinggi akan membuka peluang dalam mendapatkan pekerjaan atau upah yang layak sehingga akan menyebabkan tingkat kemiskinan menurun. Peningkatan sumber daya manusia akan memberikan pengaruh terhadap nilai pengurangan kemiskinan yang terjadi. Hal tersebut sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Zuhdiyaty (2017) yang menyimpulkan bahwa indeks pembangunan manusia terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Selanjutnya penelitian yang dilakukan Pratama (2014) yang menyimpulkan bahwa indeks pembangunan manusia serta penelitian yang dilakukan oleh Putri (2013) yang menyimpulkan bahwa indeks pembangunan manusia juga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

2) Pengangguran

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengangguran tidak berpengaruh negatif atau berpengaruh dan tidak berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan. Dari hasil perhitungan dapat diketahui bahwa variabel pengangguran memiliki koefisien sebesar 0.203020, yang artinya setiap

kenaikan pengangguran tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan sebesar 0.203020 ribu jiwa.

Selanjutnya didapatkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pengangguran berpengaruh positif dan tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kenaikan jumlah pengangguran akan menyebabkan pendapatan masyarakat menurun sehingga akan mengurangi tingkat kemakmuran yang yang dicapai masyarakat. Orang-orang yang menganggur belum tentu mempunyai pendapatan yang rendah dan orang yang menganggur tidak selamanya termasuk dalam golongan rakyat miskin selama mereka mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kemiskinan tidak selalu berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan (Godfrey, 1993).

Selain itu juga diperkuat oleh Arsyad (1997) yang mengatakan bahwa salah jika beranggapan setiap orang yang tidak bekerja adalah miskin, sedangkan yang bekerja secara penuh adalah orang kaya. Hal ini terjadi karena terkadang ada pekerja yang berada di perkotaan tidak bekerja secara sukarela karena masih mencari pekerjaan yang lebih baik dan sesuai dengan tingkat pendidikannya. Mereka menolak pekerjaan yang dirasa lebih rendah karena mereka mempunyai kemampuan lain atau kemampuan yang berbeda sehingga dapat membantu masalah keuangan mereka.

Dengan demikian dapat dikatakan kondisi pengangguran tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan pada Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Zuhdiyaty (2017) yang mengatakan bahwa pengangguran tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Sedangkan penelitian yang dilakukan Wahyudi dan Tri (2013) menunjukkan bahwa pengangguran berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan, artinya jika jumlah pengangguran naik maka tingkat kemiskinan juga akan naik. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Puspita (2015) menunjukkan hasil bahwa pengangguran berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan.

3) Upah Minimum Kabupaten

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa upah minimum kabupaten tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Hal tersebut sesuai dengan hipotesis yang sudah jelas sebelumnya. Dalam perhitungan menunjukkan bahwa variabel upah minimum kabupaten memiliki koefisien bernilai 3.600009, yang artinya setiap kenaikan upah minimum kabupaten 1% tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan sebesar 3.600009 ribu jiwa.

Kemudian untuk variabel upah minimum kabupaten menunjukkan bahwa variabel upah minimum tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan, yang berarti bahwa kenaikan upah tidak akan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Sehingga walaupun upah minimum meningkat atau menurun tidak akan menyebabkan tingkan kemiskinan naik ataupun menurun. Hal ini disebabkan oleh upah minimum yang memiliki nilai upah yang tinggi pada setiap Kabupaten atau Kota yang berada di Jawa Barat di bandingkan dengan Provinsi tetangga seperti Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah. Berikut adalah perbandingan daftar Upah Minimum Provinsi Jawa Barat dan Provinsi tetangga:

Provinsi Jawa Barat 2016	Rp 1.312.355
Provinsi Jawa Timur 2016	Rp 1.273.490
Provinsi Jawa Tengah 2016	Rp 1.265.000

Sumber : (Kabar Buruh) Tahun 2017, Diolah

Pada tahun 2016 Upah Minimum Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 1.312.355 lebih besar dari Upah Minimum Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 1.273.490 dan Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 1.265.000. Upah yang mempunyai nilai tinggi ini dikarenakan daya serap tenaga kerja yang juga tinggi. Provinsi Jawa Barat memiliki lapangan kerja yang cukup luas, dari pariwisatanya masing-masing Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat memiliki potensi yang sangat besar dan berkembang, sehingga tidak mengherankan jika upah yang ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat juga tinggi. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri

dan Ni Nyoman (2013) yang menunjukkan hasil bahwa upah minimum berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Dan selanjutnya penelitian yang dibuat oleh Andini (2017) yang menyebutkan bahwa upah minimum berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan.

KESIMPULAN

Dari hasil analisis pengaruh dari variabel yang meliputi: indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka dan upah minimum terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat tahun 2011-2016 dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat, maka hipotesis pertama dapat diterima atau terbukti
2. Pengangguran berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat, maka hipotesis kedua tidak dapat diterima atau tidak terbukti
3. Upah Minimum berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat, maka hipotesis ketiga tidak dapat diterima atau tidak terbukti

SARAN

1. Indeks pembangunan manusia harusnya diperhatikan dengan benar oleh pemerintah, pemerintah harus meningkatkan berbagai fasilitas yang sudah ada untuk kegiatan ekonomi terutama fasilitas sosial yang membantu kehidupan masyarakat seperti sekolah dengan fasilitas yang memadai, fasilitas kesehatan yang memadai dan memberikan pelatihan keterampilan bagi masyarakat sehingga dapat meningkatkan kualitas masyarakat.
2. Tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif pada tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat, pemerintah harus melakukan

kebijakan dengan melakukan pemberdayaan masyarakat dan memperluas kesempatan kerja, seperti memberikan sosialisasi atau pelatihan tata cara usaha agar masyarakat bisa membuka usaha sendiri dan menyediakan lapangan pekerjaan agar dapat mengatasi tingkat kemiskinan.

3. Upah Minimum Kabupaten atau Kota seharusnya ditetapkan dengan melihat kondisi wilayah Kabupaten atau Kota, agar tidak mengakibatkan keuntungan kepada tenaga kerja saja atau pun keuntungan pengusaha namun juga dapat memberikan keuntungan untuk bersama. Jika upah minimum terlalu rendah maka akan menyebabkan berkurangnya kesejahteraan tenaga kerja sehingga tenaga kerja tidak bisa mendapatkan kepuasan yang tinggi, sebaliknya jika upah minimum terlalu tinggi akan menyebabkan kerugian pada pengusaha dikarenakan upah minimum yang tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, F. (2012). *Pengaruh Pendidikan, Pengangguran, dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) Periode 2011-2010*. Econosains
- Astrini, N. M. (2013). *Pengaruh PDRB, Pendidikan, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali*. Ilmu Ekonomi
- Badan Pusat Statistik. (2017). *Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat, 2002-2016*. Diambil 30 Maret 2018, dari <http://www.jabar.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik. (2016). *Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota Tahun 2010-2015*. Diambil 30 Maret 2018, dari <http://www.jabar.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik. (2016). *Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota Tahun 2010-2015*. Diambil 30 Maret 2018, dari <http://www.jabar.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik. (2017). *Presentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat (Persen), 2002-2016*. Diambil 30 Maret 2018, dari <http://www.jabar.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Presentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi, 2007-2011*. Diambil dari 30 Maret 2018, dari <http://www.jatim.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Presentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi, 2012-2017*. Diambil dari 30 Maret 2018, dari <http://www.jatim.bps.go.id>
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. (2014). *Rakor TKPKD Provinsi Jawa Barat*. Diambil dari 30 Maret 2018, dari <http://www.bappeda.jabarprov.go.id>
- Badan Pusat Statistik. *Jawa Barat Dalam Angka Berbagai Tahun Terbitan, Jawa Barat*. Diambil dari 30 Maret 2018, dari <http://www.jabar.bps.go.id>
- Buruh Indonesia. *Upah Minimum Kabupaten/Kota Berbagai Tahun, Jawa Barat*. Diambil 30 Maret 2018, dari <https://mantanburuh.wordpress.com>
- Badan Pusat Statistik. (2015). *Laju Pertumbuhan Penduduk di Jawa Barat Menurut Kabupaten/Kota, 2005-2013*. Diambil 10 April 2018, dari <http://www.jabar.bps.go.id>
- Dores, Edi. (2014). *Pengaruh Angka Melek Huruf dan Angka Harapan Hidup Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Sumatra Barat*. Journal of Economics and Economic Education. Vol. 2 No 2. Hal. 126-133
- Fahmi, A. (2015). *Faktor Pendidikan dan Kesehatan Berpengaruh Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jambi*. Jurnal Development

Kabupaten Bandung. (2015). *Lima Tahun, Angka Kemiskinan dan Pengangguran Menurun*. Diambil 10 April 2018, dari <http://www.bandungkab.go.id>

Mustika, Candra. (2011). *Pengaruh PDB dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan di Indonesia Periode 1990-2008*. *Jurnal Paradigma Ekonomika*. Vol.1 No. 4

Nirwana, I. D. (2013). *Pengaruh Variabel Pendidikan Terhadap PresentasePenduduk Miskin (Studi pada 33 Provinsi di Indonesia, 6 Provinsi di Pulau Jawa, dan 27 Provinsi di Luar Pulau Jawa pada Tahun (2006-2011))*. *Imu Ekonomi*

Pikiran Rakyat. (2014). *Angka Kemiskinan di Cianjur Turun*. Diambil 10 April 2018, dari <http://www.pikiran-rakyat.com>

Pratama, Yoghi Citra. (2014). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia*. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*. Vol. 4.No. 2.Hal.210-223

Puspita, Dita Wahyuni. (2015). *Analisis Determinan Kemiskinan di Provinsi JawaTengah*. *Journal of Economics and Policy*. Vol 8.No. 1.Hal. 100-107

Putri dan Nyi Nyoman. (2013). *Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Bali*. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol.2 No. 10 Hal 441-448

Sapa Indonesia. (2013). *Data Kemiskinan di Kabupaten Garut, Hingga Kini Masih Simping Siur, Bahkan Sangat Membingungkan*. Diambil 10 April 2018, dari<http://www.sapa.or.id>

Suhartini, Titin. (2015). *Proporsi Kemiskinan di Kabupaten Bogor*. *SosioInforma*. Vol. 01 No. 02

Sukmaraga, Prima (2011). *Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, PDRB Perkapita, dan Jumlah Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah*. Skripsi Sarjana (Tidak Dipublikasikan) Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro. Semarang

Suliswanto, Muhammad Sri Wahyudi. (2010). *Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap AngkaKemiskinan di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol. 8 No.2 Desember 2010

Sumarsono, Sonny. (2003). *Ekonomi Manajemen Sumberdaya Manusia dan Ketenagakerjaan*. Graha Ilmu. Yogyakarta

Susanti, S. (2013). *Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pengangguran, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di Jawa Barat denganMenggunakan Analisis Data Panel*. *Jurnal Matematika Integratif*

Wahyudi dan Tri Wahyu.(2013). *Analisis Kemiskinan di Jawa Tengah*. *Journal of Economics*. Vol 2.No. 1. Hal 1-15

Wirawan, I. T. (2015). *Analisis Pengaruh Pendidikan, PDRB PerKapita, dan Tingkat Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Bali. Ekonomi Pembangunan.*

Zuhdiyaty, Noor. (2017). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia Selama Lima Tahun Terakhir (Studi Kasus Pada 33 Provinsi).* Jurnal JIBEKA. Vol 11. No. Hal 27-31